
Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng

Bambang Mudjiyanto¹, Felix Tawaang², Ari Cahyo Nugroho³,
Hayu Lusianawati⁴, dan Launa⁵

Badan Riset dan Inovasi Nasional^{1,2&3}, Universitas Sahid Jakarta,^{4&5}

Email Korespondensi: hayu_lusianawati@usahid.ac.id

Diterima: 12-03-2022 Disetujui: 12-03-2022 Diterbitkan: 12-04-2022

Abstrak

Isu kelangkaan minyak goreng (migor) telah meramaikan jagad media sosial melalui beragam tagar yang muncul dan menjadi trending topik. Isu publik ini kian memanas lantaran komentar elite politik dan pejabat publik saat menyikapi kelangkaan migor dipersepsi warganet tidak sensitif, nir simpatik, non-empatik, tidak logis, blunder, dan inkonsisten. Respons warganet dan tokoh masyarakat atas pernyataan elite politik dan pejabat publik itu pun beragam, mulai dari komentar yang bernada kritis, nyinyir, jenaka hingga komentar makian. Kajian kualitatif ini berupaya menganalisis isu kelangkaan migor mengacu pada teori disonansi kognitif, metode analisis interpretif, dengan teks media sebagai data utama. Hasil kajian menunjukkan: sikap inkonsisten elite politik dan pejabat publik dipicu oleh motivasi, keyakinan, dan sikap disonan, yakni rasa khawatir yang berlebih terkait derasnya kritik publik atas tata kelola kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap gagal dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang terus melangit.

Kata Kunci: Disonansi Kognitif, Elite Politik, Pejabat Publik, Kelangkaan Migor.

Abstract

The issue of scarcity of cooking oil has enlivened the world of social media through various hashtags that have emerged and become trending topics. This public issue is getting heated because the comments from political elites and public officials when responding to the scarcity of migraines are perceived by netizens as insensitive, unsympathetic, non-empathetic, illogical, blunders, and inconsistent. The responses of netizens and community leaders to the statements of the political elite and public officials also varied, ranging from critical, sarcastic, humorous comments to swearing comments. This qualitative study attempts to analyze the issue of cooking oil scarcity referring to cognitive

dissonance theory, interpretive analysis method, with media texts as the main data. The results of the study show: the inconsistent attitude of the political elite and public officials is triggered by motivation, belief, and dissonance, namely excessive worry over the swift public criticism of the government's economic policy management which is considered to have failed to maintain stability in the prices of basic necessities which continue to skyrocket.

Keywords: *Cognitive Dissonance, Political Elite, Public Official, Cooking Oil Scarcity.*

PENDAHULUAN

Selaku aktor-aktor utama pembuat dan penanggung jawab kebijakan publik, elite politik atau pejabat publik, pada ranah etika politik, akan selalu dituntut untuk bersikap konsisten (public ethics). Sebab, sikap inkonsisten dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan—apalagi policy yang terkait dengan hajat hidup rakyat—akan memberi dampak buruk bagi pembentukan citra pemerintah di mata publik, baik secara personal maupun institusional.

Isu kelangkaan minyak goreng (selanjutnya disingkat migor) yang viral di awal Februari 2022 lalu, menunjukkan betapa kebijakan publik yang disusun pemerintah serta respons dari elite politik/pejabat publik terkait isu tersebut, oleh banyak pihak dianggap tidak masuk akal dan blunder.

Komentar elite politik/pejabat publik tersebut membuat ramai jagad media sosial. Pernyataan Megawati Soekarnoputri misalnya, yang heran dengan antrian panjang ibu-ibu untuk mencari migor. Megawati bahkan membuat demo masak tanpa migor (Ramadhan, 2022; Sari, 2022). Berikutnya, komentar Menteri Perdagangan (Mendag), M. Luthfi, yang bingung dengan kelangkaan migor, padahal stok migor nasional menurutnya tidak ada masalah (JPPN.com 2022). Kemudian pernyataan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan, Didit Noordiatmoko, yang menuding ibu-ibu sebagai pihak yang 'menimbun' migor (Rifa'an 2022).

Tak ayal, pernyataan Megawati membuat warganet geram. Beragam ekspresi dan komentar warganet yang cuitannya menjadi trending topik di twitter, ditelisik dari sisi afeksi menunjukkan ada rasa jengkel dan prustasi. Reaksi warganet adalah produk penafsiran pesan publik. Rizal Ramli, lewat akun twitternya, merespons secara keras dua menteri (Airlangga Hartarto dan M. Luthfi) yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kelangkaan dan melangitnya harga migor di pasaran (Fikri, 2022).

Sejak Minggu (22/2/2022) lalu, tagar #SalimGroupNimbunMigor telah menjadi trending topik dengan 22.400 tweet (Prayitno 2022), tagar #TangkapKartelMinyakGoreng telah mencapai 3.321 tweet (Wulandari 2022), tagar #MinyakGorengLangkaAjig dengan 21.600 tweet (Indriani 2022), dan

cuitan warganet terkait pernyataan Megawati tentang antrian panjang ibu-ibu membeli migor mencapai 288 tweet (Supriyono 2022).

Ditelisik dari perspektif teori kognitif, terdapat hubungan antara pembentukan karakter individu dengan perilaku pesan, efek situasi atas perilaku pesan serta konsentrasi proses aktual pada faktor produksi pesan, pemrosesan pesan, dan penilaian pesan (Hutagalung, 2016: 73). Sementara ditinjau dari sisi isu kelangkaan migor, cuitan atau reaksi pesan (encoding) dari netizen yang umumnya bernada 'sinis' atau 'nyinyir', menunjukkan posisi dan eksistensi warganet selaku warga negara telah tercederai, mengalami ketegangan psikis, atau situasi ketidaknyamanan psikologis akibat konflik pada wilayah kesadaran (kognisi) mereka, yakni informasi dan fakta terkait kelangkaan migor yang menjadi kebutuhan dasar rumah tangga warganet.

Faktual, komentar elite politik/pejabat publik yang bias dan terkesan 'mengalihkan isu' itu menunjukkan ada problem disonansi kognitif; yakni refleksi dari gangguan kognisi/kesadaran (situasi gamang dan labil) dari para elite/pejabat dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara efektif dan solutif—di tengah upaya keras pemerintah mengatasi kelangkaan migor dan kenaikan harga BBM. Sikap blunder dari komen para elite/pejabat tersebut berdampak pada kegagalan publik dalam mempersiapkan diri menghadapi gejolak ekonomi nasional yang terus memburuk itu.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, kajian ini menimbang terdapat indikasi sikap inkonsisten dari elite politik/pejabat publik dalam menyikapi isu kelangkaan migor. Asumsi tersebut digunakan peneliti sebagai argumen untuk menganalisis lebih jauh mengapa isu kelangkaan migor telah berubah menjadi 'arena kritik publik' di saat kondisi negara masih berada dalam situasi pandemi; dan publik masih terjebak dalam kesulitan ekonomi.

KERANGKA TEORI

Inkonsistensi sikap pemerintah dan kegagalan elite politik/pejabat publik dalam mengelola informasi publik bukanlah hal baru dalam kajian ilmu komunikasi. Studi Lusianawati (2020) juga menyoal sikap inkonsisten pejabat negara dalam menangani pandemi Covid-19. Di lapangan ilmu psikologi, Jean Piaget lewat teori cognitive development-nya berdalil bahwa manusia adalah makhluk yang bisa menggunakan kecerdasan (kognitif)-nya secara bertahap. Piaget membagi kecerdasan kognitif manusia ke dalam dua wilayah: pertama area kecerdasan operatif yang bertanggung jawab atas representasi dan manipulasi aspek dinamis atau aspek transformasional dari realitas; dan kedua area kecerdasan figuratif yang bertanggung jawab atas representasi aspek statis dari realitas (courses.lumenlearning.com).

Dalam teorinya, Piaget juga berdalil tentang fungsi asimilasi dan akomodasi dalam proses berpikir. Asimilasi adalah proses pengintegrasian elemen eksternal ke dalam struktur kehidupan atau lingkungan seseorang melalui pengalaman. Asimilasi adalah cara bagaimana manusia mempersepsi dan beradaptasi terhadap informasi baru; suatu proses pengaitan informasi baru dengan ide yang sudah ada sebelumnya. Asimilasi akan hadir saat individu meraih informasi baru, dan meng-compare informasi baru tersebut dengan merujuk pada informasi yang ada sebelumnya sebagai acuan untuk mengidentifikasi dan menemukan maknanya (Agustian, n.d).

Sementara akomodasi adalah proses pengambilalihan informasi baru dalam lingkungan seseorang, dan mencocokkan dengan skema pengetahuan sebelumnya agar relevan dengan informasi baru tersebut. Kondisi ini terjadi saat skema pengetahuan yang dimiliki sebelumnya tidak berfungsi efektif, dan perlu untuk dirubah, agar seseorang bisa memahami obyek (situasi, kondisi atau realitas) baru yang dihadapinya (Agustian, n.d).

Akomodasi bersifat imperatif, karena ia terkait dengan bagaimana individu akan terus berupaya memaknai konsep, skema atau sudut pandang baru. Piaget percaya bahwa otak manusia telah mengalami pemrograman sepanjang evolusi untuk beradaptasi/meraih keseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan inilah terjadi proses perubahan yang bersifat absolut, internal dan eksternal, melalui proses dialektis asimilasi dan akomodasi. Bagi Piaget, asimilasi tidak bisa terjadi tanpa akomodasi. Untuk mengasimilasi obyek ke dalam skema mental lama, seseorang perlu untuk memperhitungan aspek akomodasi, yakni hadirnya kesimbangan mental dan kognisi agar hasil perubahan dapat mencapai tujuan utamanya (Agustian, n.d).

Konsep konsistensi dalam kognisi manusia Jean Piaget, kemudian dikembangkan oleh Kurt Lewin. Melalui teori lapangan atau teori konsistensi perilaku, Lewin menjelaskan apa yang terjadi dalam jiwa seseorang sehingga ia membentuk persepsi dan perilakunya. Menurut Lewin, perilaku (behavior) adalah fungsi dari keadaan diri (personality) dan lingkungan (environment). Faktor internal maupun eksternal dalam pribadi seseorang akan terkonsep pada area kesadaran, yang berpengaruh pada pembentukan persepsi dan perilakunya secara bertahap (Hutagalung, 2016: 71).

Pada tahap berikut, gagasan Lewin tentang konsistensi perilaku dikembangkan lebih lanjut oleh Leon Festinger yang dikenal sebagai teori disonansi kognitif (cognitive dissonance theory). Menurut asumsi teori ini, jika seseorang mengalami konflik pada wilayah kesadaran (kognisi), maka situasi ini akan memicu ketidaknyamanan psikologis. Ketika ada ketidaknyamanan psikologis atau ketidaksesuaian dalam kognisi (hadirnya situasi inkonsisten), maka akan muncul disonansi kognitif (cognitive dissonance).

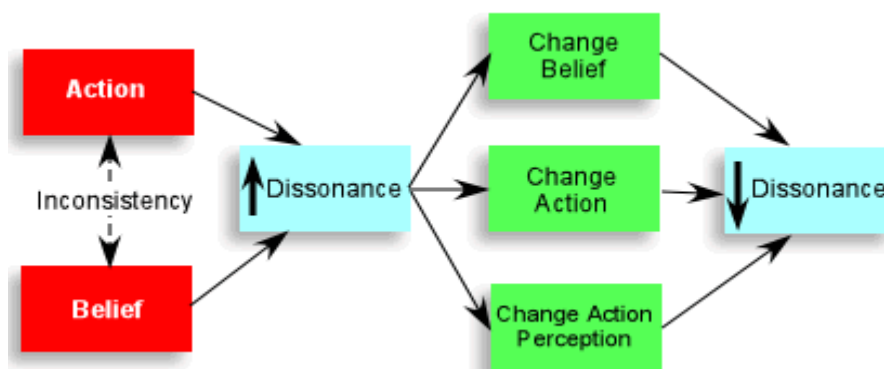
Dalam A Theory of Cognitive Disonance, secara akademik Festinger berhutang budi pada Lewin dan Piaget, karena asumsi dari teori disonansi

kognitifnya banyak dipengaruhi oleh gagasan teori lapangan (field theory) dari Lewin dan teori konsistensi Piaget, sebagai pengembangan dari konsep konsistensi dalam kognisi manusia yang saat ini sangat berpengaruh dalam studi psikologi komunikasi kontemporer (McMillan, 2015).

Festinger mengemukakan perubahan sikap dapat terjadi karena ada cognitive dissonance. Disonansi kognitif adalah situasi tidak menyenangkan saat sikap inkonsisten melatari perilaku seseorang, sehingga menimbulkan situasi ketidaknyamanan. Situasi itu membuat sikap dan perilaku seseorang berada dalam posisi tidak seimbang (labil; gamang; inkonsisten). Menurut Festinger, pada hakikatnya setiap orang akan berupaya untuk mencapai titik keseimbangan baru dengan mengubah keyakinan, sikap, dan tingkah lakunya agar lebih selaras dengan tingkah lakunya (Hendri, 2019: 176).

Sebaliknya, teori konsistensi memandang manusia sebagai pemroses yang aktif yang mencoba memahami fenomena, peristiwa, isu atau kejadian yang mereka rasakan, pikirkan atau lakukan. Sebab, manusia adalah individu yang secara aktif terus menyusun dan menafsirkan dunia untuk membuat kecocokan (konsonansi) terhadap gejala inkonsistensi yang potensial terjadi pada motivasi, keyakinan dan sikapnya (Littlejohn & Foss, 2018: 115).

Gambar 1: Konstruksi Berpikir Teori Disonansi Kognitif



Sumber: Hutagalung (2016: 73)

Menurut asumsi teori konsistensi, manusia akan merasa lebih nyaman ketika ia berada dalam kondisi 'konsisten' (proses kognitif dimana manusia memiliki hasrat keseimbangan keyakinan, sikap, dan perilakunya) ketimbang berada pada situasi 'inkonsisten' (proses kognitif dan perubahan sikap yang dihasilkan dari informasi yang mengacaukan kestabilan dan keseimbangan keyakinan, sikap dan perilakunya) (West & Turner, 2014: 139).

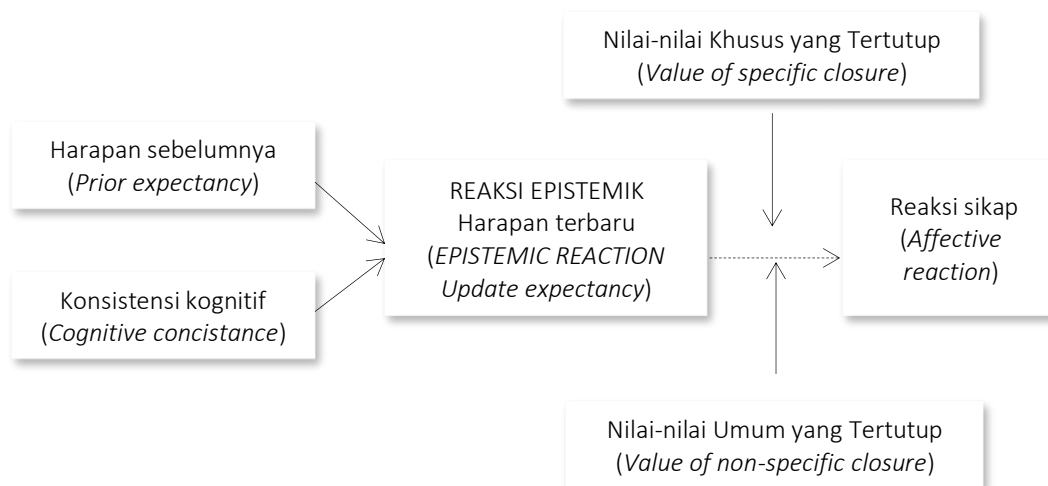
Dalam bahasa Fritz Heider, konsisten adalah keadaan 'seimbang' atau kondisi 'stabil'. Kondisi ini mampu menolak terpaan informasi yang berasal dari pengaruh-pengaruh luar. Sementara inkonsisten adalah keadaan 'tidak seimbang' yang diasumsikan muncul sebagai kondisi 'tidak stabil' (atau labil) yang menciptakan ketegangan psikologis dalam diri seseorang. Ketegangan,

ketidakstabilan, labilitas atau inkonsistensi akan mereda apabila perubahan di dalam situasi tersebut terjadi sedemikian rupa sehingga tercapai keadaan yang stabil atau simbang (Manusov & Spitzberg, 2013: 39; Saverin & Tankard, 2011: 156-157).

Bagi Festinger, ketegangan, ketidakstabilan, kegamangan, labilitas atau inkonsistensi (seperti digambarkan oleh Fritz Heider) adalah perasaan 'ketidaknyamanan' yang hadir dalam diri seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan. Kondisi ini, menurut Festinger, akan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu guna mengurangi situasi ketidaknyamanan tersebut. Festinger memulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif, seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Elemen-elemen tersebut tidak terpisahkan, tetapi saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem. Setiap elemen dari sistem tersebut akan memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya (Gerry, 2019).

Pertama, adalah jenis hubungan yang kosong atau tidak berhubungan. Dalam jenis hubungan ini tidak ada elemen yang benar-benar mempengaruhi elemen yang lain. Kedua, adalah jenis hubungan yang cocok atau sesuai, dengan salah satu elemen yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain. Ketiga, adalah jenis hubungan disonansi, yaitu ketidaksesuaian yang terjadi akibat salah satu elemen tidak mampu untuk mengikuti harapan yang lain (Festinger & Carlsmith, 1959; Lusianawati, 2020: 24-25).

Gambar 2. Model Hubungan Konsistensi Versi Pepitone (1968)



Sumber: Kruglanski, *et.al.* (2018: 48)

Menurut Festinger, salah satu cara mereduksi disonansi adalah meningkatkan kapasitas individu untuk mengubah persepsi pribadinya serta menyesuaikan dengan persepsi atau keyakinan baru yang telah diraihinya.

Tekanan untuk mereduksi disonansi menjadi fungsi upaya konsonansi. Perubahan sikap atau opini yang diamati harus menjadi fokus utama ketika tekanan yang digunakan untuk melahirkan perilaku baru sudah cukup untuk dilakukan (Festinger & Carlsmith, 1959; Lusianawati, 2020: 25).

Sementara bagi Pepitone (1968: 323; Lusianawati, 2020: 25), untuk mencapai konsistensi, diperlukan reduksi maksimal atas sikap non-spesifik, yakni struktur kognitif non-valid yang bersumber dari nilai-nilai khusus dan nilai-nilai umum yang cenderung tertutup dari terpaan harapan dan nilai-nilai baru. Tendensi untuk mencari dan mempertahankan sikap konsisten (struktur kognitif valid) sangat terkait dengan kemampuan seseorang dalam membangun reaksi epistemik, yakni membangun skema motivasi, keyakinan, dan sikap terbuka terhadap harapan atau informasi baru (lihat gambar 2).

Secara konseptual, menurut Thomas Carlyle dalam *The Theory of the Hero in History* (1974), elite politik adalah orang-orang yang menentukan kehidupan atau perjalanan sejarah politik suatu masyarakat atau suatu bangsa. Elite politik oleh Carlyle didefinisi sebagai “individu atau kelompok kecil yang menentukan hitam putihnya kehidupan politik suatu masyarakat atau bangsa”. Mereka adalah ‘orang-orang besar’ yang berbeda secara diametral dengan wong cilik atau rakyat biasa (Jainuri, n.d: 1).

Dalam *Power Personality* (2009), Harold Lasswell memaknai elite sebagai individu-individu yang meraih nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat karena kecakapan dan keterlibatan aktifnya dalam pengambilan keputusan. Elite Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu struktur politik. Elite politik terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka tak hanya punya kekuasaan, namun juga kekayaan dan kehormatan (Husen, 2016: 5).

Senada dengan Lasswell, C. Wright Mills dalam *The Power Elite* (1996) juga melihat elite adalah mereka yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan (politik). Mereka duduk pada posisi tertinggi dari hirarki institusi politik, baik selaku individu maupun sebagai kelompok. Sementara Robert Putnam dalam *The Comparative Study of Political Elites* (1976) membagi elite politik dalam dua kategori, yakni elite yang memiliki pengaruh langsung dalam proses pembuatan kebijakan, dan elite yang memiliki pengaruh tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan (Husen, 2016: 5).

Kontras dengan konsep elite politik, pejabat publik didefinisikan sebagai individu yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010). Dengan dasar ‘kepercayaan yang telah diberikan kepada pejabat publik’, maka setiap pejabat publik sebagai penyelenggara layanan publik wajib memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan harapan publik melalui penyelenggaraan layanan publik yang baik. Salah satu fungsi

pelayanan publik yang baik adalah penataan pola komunikasi publik yang efektif; disamping layanan administratif dan tata kelola birokrasi.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.” Dalam hal ini, pembina dan penanggung jawab pelayanan publik adalah pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada tingkat kabupaten; dan walikota pada tingkat kota (pn-karanganyar.go.id).

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tugas prioritas yang harus dilakukan oleh pejabat publik. Pertama, membantu masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya, termasuk membuka ruang partisipasi (dialog/diskusi) pada publik untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Kedua, membangun pola komunikasi dua arah sehingga terjalin komunikasi publik yang efektif antara pelayan publik dan publik. Ketiga, membangun iklim pelayanan publik yang sehat, termasuk menciptakan budaya melayani. Keempat, terbuka dalam menyampaikan informasi publik yang penting dan wajib diketahui publik secara cepat, tepat, dan sederhana (Dewanty, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini lebih mengutamakan kedalaman penghayatan terkait interaksi antar konsep yang berlangsung dalam suatu wilayah empirik. Riset kualitatif adalah satu pendekatan yang berupaya menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan, tulisan, dan tingkah laku individu maupun kelompok yang dapat diamati dari para aktor/pelaku/subyek itu sendiri (Semi, 2012: 30).

Pendekatan riset kualitatif mengandung beberapa karakteristik pokok berikut: (1) latar kajian/obyek penelitian bersifat alamiah (natural setting); (2) peneliti merupakan instrumen kunci; (3) desain penelitian bersifat lentur dan terbuka; (4) analisis atas fenomena atau realitas yang menjadi fokus kajian bersifat deskriptif, reflektif, dan interpretatif; (5) laporan penelitian menggunakan bahasa verbal yang cermat dan sistematis; (6) mengutamakan proses daripada hasil (research output sangat ditentukan oleh langkah sistematis dalam proses penelitian); (7) analisis data bersifat induktif; (8) makna merupakan sesuatu yang esensial dengan tujuan untuk menyingkap sudut pandang/informasi dari informan/subyek penelitian secara cermat dan akurat; (9) sampling dilakukan secara internal (purposif), bersumber pada pemilihan informan kunci yang diasumsikan memiliki derajat informasi yang paling representatif; dan (10) memungkinkan peneliti mendekati data secara

langsung guna mengembangkan keterangan secara analitis, konseptual, dan kategoris (Sugiono, 2010: 10).

Adapun model analisis yang digunakan adalah kombinasi dari model analisis interpretif (interpretive analysis) dan analisis isi (content analysis). Analisis interpretif adalah metode analisis yang berupaya memahami secara sistematis bagaimana individu memaknai pengalaman penting dalam hidupnya dalam latar sosial yang alamiah; mengukur secara cermat persepsi partisipan dalam memaknai dunia personal dan sosialnya; memfokuskan kajiannya pada sifat subyektif dari dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya (Sugiono, 2010: 13).

Dalam paradigma interpretif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa (Burrell & Morgan, 2016). Setidaknya, terdapat tiga prinsip dasar yang berkembang dalam cara pandang paradigma interpretif: Pertama, individu menyikapi sesuatu peristiwa yang ada di lingkungannya berdasarkan makna yang dibuat (dikonstruksi)-nya sendiri. Kedua, makna tersebut terbentuk karena adanya interaksi sosial yang terjalin dengan individu lain. Ketiga, makna yang di dapat (atau terbentuk dari hasil konstruksi individu) akan dipahami, di modifikasi, dan dimaknai oleh individu melalui proses interpretif sebagai sarana konstruksi sosial yang dihadapinya (Sutrisno & Hanafie, 2007: 167).

Dalam analisis interpretif, individu dipandang sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak; yang membangun realitas sosial secara aktif dan sadar, sehingga setiap individu (selaku warganet) dimungkinkan memaknai atas suatu peristiwa secara berbeda. Artinya, realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial dari serangkaian interaksi antar pelaku sosial dalam satu lingkungan sosial (Rahardjo, 2018).

Sementara analisis isi (content analysis) adalah metode analisis ber-genre kualitatif. Metode ini pertama kali dipelopori oleh Harold D. Lasswell, saat Lasswell dalam penelitiannya menggunakan teknik symbol coding, yakni teknik mencatat lambang, informasi, atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi secara obyektif dan sistematis (Asfar, 2019: 2).

Metode analisis isi umumnya menekankan pada ukuran kebakuan yang diterapkan pada satuan-satuan analisis yang akan ditetapkan sebagai obyek kajian (berupa tulisan, teks, dokumen atau gambar), baik untuk kepentingan analisis internal maupun analisis perbandingan (Asfar, 2019: 2). Metode ini memberi porsi pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode analisis isi meliputi semua varian analisis mengenai isi teks, disamping analisis isi juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang bersifat spesifik.

Sementara Barelson dalam Social Research Glosary (2022), memaknai analisis isi sebagai “a research technique for the objective systematic and quantitative description of the manifest content of communication”. Artinya,

analisis isi adalah suatu metode pengambilan kesimpulan melalui identifikasi berbagai karakteristik khusus atas lambang, informasi atau pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti mengikuti aturan atau prosedur yang ketat. Sistematis berarti penetapan kategori harus dilakukan secara konsisten. Generalis berarti penemuan harus memiliki referensi teoritis, dimana data (pesan verbal atau informasi yang diperoleh dari hasil analisis) harus bisa dihubungkan dengan atribut lain dan memiliki relevansi teoritis yang tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik dokumentasi melalui pengumpulan data primer berupa teks berita dan cuitan/tweet netizen yang tersaji di berbagai laman berita. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif (deskriptif-interpretif). Sumber data lain yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier, seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber tulisan di website terjaga yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: (1) pengumpulan dan klasifikasi data; (2) identifikasi dan kategorisasi data yang akan disusun ke dalam satuan-satuan analisis; (3) interpretasi dan analisis data teks berita; dan (4) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk teks berita maupun komentar warganet yang dikutip dari twitter. Sampel komentar warganet ditentukan secara purposif. Dalam sajian penelitian ini, teks berita dan komentar warganet yang berhasil dihimpun (melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi) secara purposif akan dianalisis dengan metode interpretif teks berita dan metode analisis isi mengacu pada asumsi teori disonansi kognitif.

Tren Komentar Elite Politik dan Pejabat Publik Terkait Kelangkaan Migor

Komentar elite politik/pejabat publik yang *'nyeleneh'*, di era kebebasan informasi saat ini, selalu berpotensi menjadi ajang polemik. Di ruang sosial media, kelangkaan isu migor telah menyulut reaksi publik, mulai dari reaksi yang bernada kritis, *nyinyir*, jenaka hingga makian. Reaksi publik di ruang virtual terkait kelangkaan Migor menjadi makin *'memanas'* lantaran elite politik/pejabat publik yang bertanggung jawab untuk merespons dan

melakukan klarifikasi atas isu kelangkaan itu, komentar mereka justru dianggap tidak sensitif, kurang simpatik, dan minus empati oleh warganet.

Salah satu petinggi partai politik ternama, Megawati Soekarnoputri misalnya, justru bertanya dengan nada heran saat ia melihat ibu-ibu rela antri panjang demi membeli migor. Mantan Presiden RI ke-4 itu bertanya: “apakah ibu-ibu setiap hari kerjanya hanya menggoreng saja, sampai-sampai minyak goreng jadi rebutan” (Ramadhan 2022).

Teks 1. Komentar Megawati Soal Ibu-ibu Rebutan Minyak Goreng



Sumber: www.wanheartnews.com (2022)

Tak sampai disitu, Megawati bahkan mengajak ibu-ibu kader PDI Perjuangan melakukan ‘demo masak’ tanpa menggunakan migor. Acara demo masak—yang digelar secara *off line* di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan—ingin menunjukkan kepada ibu-ibu bagaimana cara jitu memasak tanpa migor, dengan teknik merebus, mengukus, atau membuat rujak. Demo masak ‘ala Megawati yang dipandu oleh chef Hendry tersebut juga berlangsung secara online dan disiarkan secara resmi oleh *channel* YouTube dan akun Facebook milik PDI Perjuangan (Sari 2022).

Contoh komentar lain datang dari Menteri Perdagangan (Kemendag), Muhammad Luthfi. Sang Menteri misalnya memberi dalih soal regulasi migor: “ada mafia yang menyelundupkan pasokan minyak goreng ke luar negeri”. Menurut Luthfi, harusnya ketika pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Domestic Market Obligation (DMO)—seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022—maka kebutuhan pasar domestik untuk minyak goreng otomatis sudah terpenuhi (JPPN.com 2022).

Dalam beberapa waktu berselang, Menteri Luthfi kembali membuat pernyataan mengejutkan di depan awak media massa: “Mending Mana, [harga] Murah tapi Barang Kosong, atau [harga] Mahal Sedikit tapi Stok Banyak?” (Ika 2022). Contoh komentar pejabat publik yang juga *nyeleneh* adalah *statement* Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko. Didid malah menduga, “masyarakatlah yang telah melakukan penimbunan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan di pasar” (Rifa’an 2022).

Teks 2: Pernyataan *Blunder* Menteri Perdagangan Terkait Migor

Teks 3: Kemendag Tuding Rakyat Melakukan Penimbunan Migor



Sumber: Wandanovi (2022)

Sumber: Tribun Jateng (2022)

Polemik muncul, saat media sosial secara massif merilis pernyataan elite/pejabat di atas. Komentar itu telah memantik komentar panas warganet di media sosial. Di jejaring twitter, muncul ribuan komentar netizen terkait komentar elite politik/pejabat publik yang dianggap *blunder* dan inkonsisten.

Tren Komentar Tokoh Publik

Melalui akun twitternya (@RizalRamli), ekonom Senior Rizal Ramli memberi komen keras pada dua Menteri yang dianggap bertanggungjawab atas kenaikan dan kelangkaan migor. "Selain tanggung jawab langsung Menteri Perdagangan, minyak goreng adalah tanggung jawab Menko Perekonomian." Komentar pedas Rizal juga menyasar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto: “Kemana ya? Apa lagi sibuk pasang baliho. ‘Ntar diturunin kang Dudung loh”. Rizal beropini, kinerja Airlangga Hartarto tidak fokus, lebih sibuk nyiapin diri untuk Pilpres 2024 ketimbang mengurus minyak goreng. Komentar Rizal di akun twitternya telah mendapat 1,062 *retweets*, 53 *quote tweets*, dan 2,928 *likes* (Romadhani, 2022).

Teks 4: Komentar Rizal Ramli



Sumber: Romadhoni (2022)

Teks 5: Komentar Faisal Basri



Sumber: CNN Indonesia (2022).

Ekonom senior lainnya, Faisal Basri dalam akun twitternya (@faisalbasri), juga mengunggah komentar, bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW sebagai pihak yang bersikap seperti 'maling teriak maling'. Komentar Faisal di akun twitternya adalah respons atas berita penetapan IWW (bersama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT) sebagai tersangka Kejaksaan atas kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang dikeluarkan oleh IWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (CNN Indonesia, 2022).

Rasa kecewa netizen juga diekspresikan oleh akun @BossTamlen yang mengunggah video Cak Nun, tokoh budayawan ternama, yang juga ikut memberi komentar terkait pernyataan Megawati. "Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak 'ngerti'. Dia 'ndak punya ilmu untuk memahami itu. Dia 'ndak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia 'ndak pernah bergaul di kampung-kampung. 'Ndak pernah utang. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden [yang besar] di [lingkungan] istana". Per tanggal 8 Maret 2022, jam 08.36 AM, video pernyataan Cak Nun yang diunggah oleh akun twitter @BossTamlen ini telah mencapai rating 17.100 *retweets*, 5.795 *quote tweets*, dan 45.500 *likes* dari warganet (twitter.com/BossTemlen/status/).

Tren Komentar Warganet

Komentar bernada kritis, *nyinyir* dan makian dari warganet misalnya, juga bisa kita simak dari liputan Dian Aura Lina (2010) terkait pernyataan Megawati: "Bu Mega yang terhormat kok *statementnya* kaya gitu sih, malah nyuruh rakyat ngerebus jangan digoreng, coba ibu jadi rakyat, rakyat jadi ibu" (akun @KumisUsakti); atau "Tolong ya bu Mega, belajar lagi tata bahasa yang

benar dan pola pikirnya diasah lagi. Muncul-muncul kok nyakitin, 'ga beda sama mantan 'gue dah" (akun @sayaaminnn).

Reaksi warganet lain muncul dari tagar #MinyakGorengLangkaAjig: "Minyaaaaakkk 'ya Allah minyak mahal banget, dimana2 kosong, sekalinya ada di warung merk apa tau, butek banget minyaknya Minyak kenapa begini banget sih, zaman macem apa sih ini" (akun @auliafirday8); atau "Dua periode dengan kebijakan yang merugikan rakyat, lalu survei tingkat kepuasan rakyat tinggi (entah rakyat yang mana), kemudian ditambah usulan penundaan pemilu 2024. Hey, bangun terlalu miring tidurmu, jadinya tidak tahu diri" (akun @WandhiraAyhu) (nitter.1d4.us, 2022).

Netizen juga menyeru lewat Tagar #TumpasMafiaMinyakGoreng. Tagar ini telah menyulut ribuan komentar di laman twitter. Mengutip catatan Fikri (2022), sampai dengan Selasa 8 Februari 2022 lalu, *tweet* dalam Tagar #TumpasMafiaMinyakGoreng telah mencapai 6.265 *tweet*. Aksi warganet diduga dilakukan tak hanya sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas kelangkaan minyak goreng, namun lebih dari itu, sebagai bentuk kekesalan dan keresahan warganet atas berbagai pernyataan pejabat yang inkonsisten.

Keluh kesah warganet misalnya, dapat kita baca dari komen netizen berikut: "Huff capek banget deh minyak goreng bener-bener kosong semua. Gua muter-muter ke toko kosong semua #TumpasMafiaMigor" kata akun @kiddi**. "Parah sih nyari kemana pun 'gak ada ini minyak goreng, kalau bener ada mafianya sih parah banget #TumpasMafiaMigor", balas akun @Bangun_swd. "Gak punya hati nurani kalau dalam kasus minyak goreng ada mafianya #TumpasMafiaMigor," keluh akun @IntanSari. "Berharap banget mafia-mafia minyak goreng diberantas, supaya harganya bisa stabil lagi #TumpasMafiaMigor," komen akun @takoo. "Katanya udah satu harga, mana janjinya. #TumpasMafiaMigor," timpal akun @MasGan (Fikri, 2022).

Teks 6: #TumpasMafiaMigor

Teks 7: #SalimGroupNimbunMigor



Sumber: Fikri (2022)



Prayitno (2022)

Media Sosial dan Disonansi Kognitif Elite Politik dan Pejabat Publik

Isu kelangkaan migor (salah satu kebutuhan pokok yang penting dan sensitif bagi publik), dalam konteks komunikasi massa, seharusnya bersifat dinamis (dua arah; komunikatif), jujur, terbuka, etis, dan adil. Pasalnya, di era di mana warga negara hidup akrab dengan media sosial, tak jarang dunia virtual digunakan warga negara sebagai sarana ‘perlawanan sosial’ atau alat ‘delegitimasi politik’ saat publik merespons satu isu tertentu yang dianggap tidak jujur, *unfear*, tertutup, dan mencederai nilai-nilai ‘kebaikan bersama’ (*common good*) dan ‘kepentingan publik’ (*public interest*).

Menurut Lewis, Pea & Rosen (2010), di era *network society*, media sosial secara dramatis kerap berfungsi sebagai sarana konstruksi sosial untuk mengubah lanskap politik di ruang komunikasi massa, seperti memacu perilaku agresif massa, mengukuhkan model partisipasi non-konvensional, mendramatisir isu politis tertentu, hingga sarana teknis khalayak dalam mengaktifkan hak-hak kebebasan sipil dan politiknya selaku warga negara.

Sementara menurut Tapscott (2009), era generasi berjejaring (*net generation*) adalah era dimana pengguna jejaring media sosial memiliki karakteristik yang tidak hanya kritis, namun juga bersikap liberal, seperti ekspresi berlebih atas kebebasan (*freedom*), bertindak sebagai konsumen aktif (*customization*), bersikap kritis (*scrunity*), konsen terhadap integritas informasi (*integrity*), insting alami untuk terus berkolaborasi dan berinovasi (*collaboration*), cenderung mengikuti *headline* suatu berita secara kontinyu (*entertainment*), cepat dan terbiasa memberi respons instan (*speed*), dan besar dalam lingkungan ide dan budaya inovasi teknologi informatika yang dinamis (*innovation*) (Sugihartati, 2014: 105-109).

Berikutnya, Dresang dan Kyunwong (2009) setidaknya mencatat lima ciri *net generation*: (1) aktif berinteraksi dengan perubahan sumber informasi dan menciptakan suatu sinergi; (2) lebih memilih mengekspose diri pada informasi yang bersifat visual dan grafis; (3) kemampuan *multitasking* atau kemampuan melibatkan diri dalam beragam aktivitas secara simultan; (4) kecenderungan untuk menelusur informasi secara non-linear dan non-sekuens (kebiasaan melacak dan membaca informasi dengan cara meloncat dan tak beraturan); dan (5) tren eksplorasi informasi untuk pengembangan eksistensi diri dan kontrol atas perilaku informasi secara tekstual maupun *hypertext* (Sugihartati, 2014: 112-114).

Ditelisik dari sisi bahasa, disonansi kognitif dalam komentar Megawati atas isu kelangkaan migor yang tayang di ruang media sosial dilatari oleh tidak terpenuhinya aspek *relevansi* terkait komennya selaku elite politik atas isu kelangkaan migor yang hendak ia respons. Penggunaan kalimat bertanya: “*apakah ibu-ibu setiap hari kerjanya hanya menggoreng saja, sampai-sampai minyak goreng jadi rebutan*” jelas tidak akan memberi solusi terkait inti masalah, karena bentuk kalimat pertanyaan—menurut KBBI—bukan jenis

kalimat yang terkait, bersangkutan-paut, dan berguna secara langsung untuk menjawab suatu isu/masalah yang hendak diselesaikan (kbbi.web.id).

Ditelisik dari sisi analisis interpretif, kalimat dalam bentuk pertanyaan dari Megawati bisa ditafsirkan secara luas (konotatif) sebagai representasi simbolis dari 'ketidakpedulian' dan 'ketidakberpihakan' elite politik terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat. Logika ini sebangun dengan asumsi teori kognitif, bahwa terdapat relasi signifikan antara proses pembentukan karakter individu dengan perilaku pesan yang dihasilkan. Asumsi teori kognitif ini tercermin dari komentar Cak Nun berikut: "*Dia 'ndak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia 'ndak pernah bergaul di kampung-kampung. 'Ndak pernah utang. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana*".

Mengutip Festinger, kesadaran Megawati sebagai manusia adalah kesadaran yang terbentuk dari proses perjalanan hidupnya sebagai anak presiden yang lahir, tumbuh, dan besar lingkungan istana yang mapan. Perjalanan kesadaran kognitif manusia secara aktif akan berupaya menyusun dan menafsirkan dunia untuk membuat kecocokan atas apa yang dia rasakan, yakni terpaan kesadaran (skema kognisi) masa lalunya yang bertransformasi menjadi motivasi, keyakinan, dan sikapnya (Lihat Littlejohn & Foss, 2018).

Ditinjau dari sisi analisa konten, seperti disampaikan Lasswell dan Barelson, simbol kode (proses pelabelan dan pengorganisasian data guna mengidentifikasi tema utama, seperti tulisan atau gambar) seperti tercermin dari teks pernyataan Megawati dan tayangan demo masak di *channel* YouTube dan akun Facebook milik PDI Perjuangan menunjukkan ada unsur *bias* pemahaman, penggeseran isu, ketidakpekaan, dan problem inkonsistensi sebagai konsekuensi logis dari situasi kognitif yang gamang, labil, dan arogan dalam menyikapi isu/masalah sensitif yang tengah dihadapi publik.

Sementara terkait komentar Mendag M. Luthfi dan Irjen Kemendag Didid Noordiatmoko, Ditelisik dari kaidah bahasa, aspek disonansi kognitif terlihat dalam ekspresi pernyataan M. Luthfi: "*Mending Mana, [harga] Murah tapi Barang Kosong, atau [harga] Mahal Sedikit tapi Stok Banyak?*" atau pernyataan Didid: "*masyarakatlah yang telah melakukan penimbunan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan di pasar*" terkesan lebih menunjukkan makna bahasa 'internal' (bahasa birokrasi), seolah kedua pejabat publik tersebut tengah berbicara dengan para staf/bawahan, sehingga pernyataan mereka yang sesungguhnya bersifat 'eksternal' (yang beresonansi di ruang publik virtual) sulit dimengerti dan dipahami oleh warganet. Padahal, lewat bahasa, komen seorang pejabat publik adalah hasi dari identifikasi dan internalisasi nilai-nilai atau skema informasi eksternal yang dijumpainya.

Artinya, pernyataan kedua pejabat publik di atas tidak mencerminkan obyektivitas pemaknaan atas realitas 'eksternal' yang dijumpainya. Realitas eksternal direspons dengan menggunakan gaya bahasa 'internal', sehingga interpretasi atas masalah kelangkaan migor yang bersifat eksternal menjadi

bias dan subyektif; dan sebaliknya memantik tafsir (*encoding*) negatif dari warganet selaku komunikan. Komentar kedua pejabat publik di atas menjadi bias dan subyektif, karena dari sisi semantik tidak memenuhi unsur kohesi (keterpaduan kata), koherensi (pengertian kalimat yang logis), dan konjungsi (adanya korelasi antara pernyataan dan fakta yang dinyatakan).

Meminjam asumsi Lewin, respons kedua pejabat publik gagal dalam memisahkan ekspresi logis (kemasukakalan) antara *kecerdasan operatif* yang bertanggung jawab atas representasi dan manipulasi aspek dinamis atau aspek transformasional dari realitas (keresahan publik dalam memaknai dan menyikapi kelangkaan migor) dengan *kecerdasan figuratif* yang bertanggung jawab atas representasi aspek statis dari realitas (melihat kelangkaan migor sebagai kesalahan para pelaku bisnis dan mekanisme pasar, bukan sebagai kesalahan kebijakan dan tata kelola ekonomi pemerintah).

Ditinjau dari sisi analisa konten versi Lasswell dan Barelson, simbol kode pernyataan kedua pejabat publik menunjukkan ada *bias* pemahaman, ekspresi ketidakpekaan, dan problem inkonsistensi. Inkonsistensi respons tersebut mencerminkan medium bahasa yang digunakan tidak muncul dari gagasan, ekspresi, dan bentuk pernyataan/kalimat yang kohesif, koheren, dan konjungtif. Bahasa yang seharusnya menjadi saluran ekspresi logis, karena disampaikan dengan respons keliru (anti wacana), pada akhirnya melahirkan wacana tandingan (*counter discourse*) dari warganet yang—jika terus dibiarkan—potensial menggerus citra dan legitimasi pemerintah.

Dengan kata lain, respons elite/pejabat terkait isu migor cenderung asal tebak, sulit dimengerti/dipahami secara logis, dan inkonsisten. Problem inkonsistensi merefleksikan adanya gangguan kognisi, yakni sikap 'gamang' dan 'labil' elite/pejabat dalam mengatasi desakan informasi dan mengelola komunikasi publik secara jujur, terbuka, cepat, tepat, dan efektif di ruang virtual media sosial. Sikap inkonsisten elite/pejabat praktis telah mereduksi kognisi publik (warganet) selaku komunikan aktif gagal dalam memaknai (meng-*encode*) isu kelangkaan migor sebagai bagian dari krisis ekonomi.

Sebagai 'orang besar', elite/pejabat juga gagal dalam melakukan proses asimiliasi, yakni konsistensi dalam mengintegrasikan elemen eksternal (keresahan publik) ke dalam struktur kognisi (pengetahuan; kesadaran) yang simpatik-empatik agar publik bisa beradaptasi dengan isu kelangkaan migor sebagai informasi yang perlu disikapi secara obyektif. Kegagalan *asimilasi* adalah wujud dari ketidakmampuan elite dan pejabat meng-*compare* ide atau informasi baru (suasana keresahan publik akibat kelangkaan migor) dengan merujuk pada bangunan nilai budaya politik elite dan birokrasi publik yang bersikap adaptif, responsif, imparial, dan pro-publik sebagai basis acuan, sehingga elite/pejabat mampu secara cepat, tepat, dan efektif membaca fakta, mengidentifikasi data, menemukan makna, dan membuat solusi.

Elite/pejabat juga bisa dikatakan menghadapi simptom disonansi kognitif dalam melakukan proses *akomodasi*, yakni men-*take over* informasi baru (wacana kelangkaan migor yang telah memicu keresahan publik) dan mencocokkan dengan skema kebijakan publik yang non-elitis dan non-birokratis, sehingga relevan dengan harapan publik. Kegagalan elite/pejabat disebabkan karena skema pengetahuan mereka tidak berfungsi efektif (bias kognitif, orientasi feodal, perilaku birokratis, dan sikap anti-kritik) sehingga elite/pejabat mengalami disonansi kognitif saat publik menuntut tanggung jawab komunikatif mereka terkait wacana kelangkaan migor sebagai obyek vital kebijakan publik. Kedua pejabat, praktis telah gagal merespons harapan publik dan gagal dalam memosisikan publik sebagai subyek komunikasi aktif.

KESIMPULAN

Di era kebebasan informasi, elite politik/pejabat publik, faktual tanpa sadar telah merespons secara keliru saat mereka menyikapi isu kelangkaan migor. Komentar mereka labil, gamang, dan inkonsisten. Di ruang virtual, respons tersebut telah memantik polemik panas dan menyulut reaksi publik, mulai dari reaksi publik yang bernada kritis, *nyinyir*, jenaka hingga makian.

Respons elite/pejabat juga tekonstruksi dalam teks 'bertanya' dan 'menggeser inti persoalan'. Realitas ini mencirikan situasi ketidaknyamanan psikologis yang melecut inkonsistensi sikap elite/pejabat akibat derasnya desakan dan tuntutan publik. Pada akhirnya, respons elite/pejabat yang labil, gamang, dan inkonsisten tersebut juga berdampak pada ketidaknyamanan (kebingungan) mayoritas publik yang membutuhkan medium komunikasi publik yang konsisten (ada keterbukaan, kejelasan, dan kepastian informasi).

Kehadiran beragam tagar terkait isu kelangkaan migor yang dibarengi dengan ribuan cuitan/*tweet* warganet yang bersuara kritis, *nyinyir*, jenaka hingga makian menjadi konsekuensi logis dari era media sosial yang berciri *network society/net generation*, kritis, liberal, ekspresif (dalam mengaktifkan hak-hak sipil dan politiknya); bertindak selaku konsumen aktif, fokus pada integritas informasi, insting alami untuk berkolaborasi dan berinovasi, terbiasa merespons isu/berita secara instan, dan tumbuh dalam lingkungan jejaring media yang berwatak kolektif, inovatif, dan dinamis.

Karakteristik lain yang menjadi ciri interaksi komunikasi publik di ruang virtual adalah ciri interaktif, dengan perubahan sumber informasi yang kohesif dan terus menciptakan sinergi; cenderung mengekspos diri pada informasi yang bersifat visual dan grafis; bersifat *multitasking*; tren menelusur sumber informasi secara non-linear dan non-sequens; eksploratif atas ragam informasi tekstual dan *hypertext*, serta potensial menggunakan media sosial sebagai sarana perlawanan sosial dan alat delegitimasi politik.

Tren sikap inkonsisten tersebut menunjukkan: ada motif, keyakinan, dan sikap inkonsisten dalam kognisi (pengetahuan; kesadaran) elite/pejabat. *Pertama*, kelemahan konstruksi kognisi elite/pejabat yang sulit memosisikan dirinya menjadi rujukan dan sumber informasi otoritatif bagi publik—di tengah situasi krisis ekonomi yang labil dan penuh ketidakpastian. *Kedua*, lemah dalam mereduksi sikap non-spesifik, yakni struktur kognitif non-valid yang bersumber dari nilai-nilai khusus (bias informasi dari lingkungan internal) dan nilai-nilai umum (bias informasi dari lingkungan eksternal, terutama asupan informasi dari laporan pintas media massa).

Ketiga, kurang menimbang bias informasi yang mungkin terjadi saat menyusun kebijakan. Bias informasi potensial menutup keyakinan, motivasi, dan harapan baru yang bisa jadi lebih logis, lebih realistis, dan lebih solutif. *Keempat*, disonansi kognitif akhirnya eksis saat elite politik/pejabat gugup dan gagap merespon kritik publik terkait isu kelangkaan migor sebagai implikasi logis dari sikap ragu atau rasa khawatir yang berlebihan. Derasnya kritik dan tuntutan publik atas tata kelola ekonomi dan kebijakan barang publik yang sumir telah berujung pada kegagalan komunikasi publik antara warganet *vis a vis* elite politik/pejabat yang membising di ruang media sosial.

Daftar Pustaka

- Agustian, A.G. (n.d). Teori Tranformasi Karakter: Disarikan dari Teori Piaget Mengenai Perkembangan Kognitif Intelegensi dan Moral. <http://aryginanjar.com/teori-tranformasi-karakter-disarikan-dari-teori-piaget-mengenai-perkembangan-kognitif-intelegensi-dan-moral/>
- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas.com dan detik.com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 24–36. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/20>
- Andi, A., & Sukri, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di Pekanbaru. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 37–49. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/21>
- Asfar, A.M.I.T. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). <https://www.researchgate.net/publication/330337822>. DOI: 10.13140/RG.2.2.21963.41767.
- “Bener Kata Cak Nun Megawati Mana Ngerti Kesulitan Hidup Rakyat Kecil, Sejak Kecil Hidupnya di Istana”. <https://www.wanheartnews.com/2022/03/bener-kata-cak-nun-megawati-mana-ngerti.html>.

- Burell, G., & G. Morgan (2016). *Sociological paradigms and organizational analysis*. USA, New York: Routledge.
- Cahaya, D. (2022). Minyak Goreng Langka, Warganet Bagi-Bagi Foto Bukti di Media Sosial. <https://www.koranmemo.com/gaya-hidup/pr-1922588951/minyak-goreng-langka-warganet-bagi-bagi-foto-bukti-di-media-sosial>.
- CNN Indonesia (2022). Faisal Basri Sindir Dirjen Daglu Jadi Tersangka: Maling Teriak Maling. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220419201317-92-786867/faisal-basri-sindir-dirjen-daglu-jadi-tersangka-maling-teriak-maling>.
- Dewanty, B.W. (2021). Tiga Tugas Utama Pejabat Publik Setelah Dilantik. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tiga-tugas-pertama-pejabat-publik-setelah-dilantik>.
- Festinger, L., & J.M. Carlsmith (1959). Cognitive consequences of forced compliance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 58(2): 203-210. DOI: 10.1037/h0041593.
- Fikri, A.H.T. (2022). Minyak Goreng Langka, Tagar #TumpasMafiaMigor Menggema di Twitter. <https://www.sewaktu.com/news/pr-1532621374/minyak-goreng-langka-tagar-tumpasmafiamigor-menggema-di-twitter>.
- Gerry (2019). *Consistency Theory*. <http://gerry05.blogspot.com/2019/04/consistency-theory-teori-konsistensi.html>.
- Hendri, E. (2019). *Komunikasi persuasif: Pendekatan dan strategi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Husen, M.R. (2016). Konflik elite politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007. *Jurnal Holistik: Journal of Social and Culture*, 10(18), 1-24.
- Hutagalung, I. (2016). Disonansi kognitif pada perilaku seks pranikah. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 71-80. <https://doi.org/10.25008/jkiskivi2.52>.
- Ika, A. (2022). Saat Mendag Bingung soal Minyak Goreng, lalu Tanya ke Ibu-ibu: Mending Mana, Murah tapi Barang Kosong, atau Mahal Sedikit tapi Stok Banyak? <https://money.kompas.com/read/2022/03/21/170000626/saat-mendag-bingung-soal-minyak-goreng-lalu-tanya-ke-ibu-ibu-mending-mana?page=all>.
- Indriani, R.M.D. (2022). 'Minyak Goreng' Trending Topic di Twitter, Warganet Kritik Habis-habisan Pemerintah: Puncak Komedi. <https://www.suara.com/news/2022/02/20/125614/minyak-goreng-trending-topic-di-twitter-warganet-kritik-habis-habisan-pemerintah-puncak-komedi?page=1>.

- Jainuri (n.d). Orang Kuat Partai di Aras Lokal: Blater Versus Lora dalam Percaturan Politik. https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/orang_kuat_partai_di_aras_lokal.pdf.
- JPNN.com (2022). Minyak Goreng Sempat Langka, Mendag: Ini Perbuatan Mafia. <https://m.jpnn.com/news/minyak-goreng-semat-langka-mendag-ini-perbuatan-mafia>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. "Relevan". <https://kbbi.web.id/relevan>.
- "Kemendag Curiga Banyak Warga Timbun Minyak Goreng di Dapur" (Channel YouTube yang diunggah Tribun Jateng, pada 7 Maret, 2022, dengan 1,850 views). <https://www.youtube.com/watch?v=-ledytkub84>.
- Kruglanski, A.W., *et.al.* (2018). Cognitive consistency theory in social psychology: A paradigm reconsidered. *Psychological Inquiry*, 29(2): 45-59. DOI: 10.1080/1047840X.2018.1480656.
- Lewis, S., R. Pea, & J. Rosen (2010). Beyond participation to co-creation of meaning: mobile social media in generative learning communities. *Social Science Information*, 49(3), 351-369. <https://doi.org/10.1177/0539018410370726>.
- Lina, D.A. (2022). Bu Mega Trending di Twitter, Netizen Sayangnya Pernyataan Megawati Terkait Minyak Goreng.
- Littlejohn, S.W., & K.A. Foss (2018). *Teori komunikasi (Theory of human communication)*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lusianawati, H. (2020). Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. *Jurnal The Source*, 2(2), 21-39. <https://doi.org/10.36441/thesource.v2i2.306>.
- Manusov, V., & B. Spitzberg (2013). "Attribution theory finding good cause in the search for theory", in Baxter. L.A., & D.O. Braithwaite, (ed). *Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives*. Second Edition (pp. 39-49). SAGE Publications, Inc.
- McMillan, D. (2015). Leon Festinger: Biography & Cognitive Dissonance Theory. <https://study.com/academy/lesson/leon-festinger-biography-cognitive-dissonance-theory-quiz.html>.
- Nugroho, R. A., & Riauan, M. A. I. (2022). Analisis Wacana Surat Kabar Riau Pos Rubrik Menuju Riau 1. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 61-75. Retrieved from <https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/19>
- Parwati, D., & Pithaloka, D. (2022). Perilaku Komunikasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Suka Makmur Kabupaten Kampar. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 50-60. Retrieved from

<https://journal.rc-communication.com/index.php/JPCM/article/view/22>

Piaget's Theory of Cognitive Development, Part II: Educational Psychology. <https://courses.lumenlearning.com/teachereducationx92x1/chapter/piagets-theory-of-cognitive-development/>

Pelayanan Publik (2015). <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>.

Pepitone, A. (1968). "The problem of motivation in consistency models", in Abelson, R.P., E. Aronson, & W.J. McGuire (ed.), *Theories of cognitive consistency: A sourcebook* (pp. 319–326). Chicago, IL: Rand McNally.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Palaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://jdih.bumn.go.id/lihat/PP_Nomor_61_Tahun_2010.

Prayitno, H. (2022). Viral ! Hastag Minyak Goreng Menyodok Jadi Trending Topik di Media Sosial, Netizen: Jokowi Bisa Apa? <https://parangmaya.com/viral-hastag-minyak-goreng-menyodok-jadi-trending-topik-di-media-sosial-netizen-apakah-sahamnya-bakal-rontok-atau-enggak/>

Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif. <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf>.

Ramadhan, A. (2022). Megawati Komentari Ibu-ibu Antre Minyak Goreng, Pengamat: Elite Politik Harusnya Berempati. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/15350881/megawati-komentari-ibu-ibu-antre-minyak-goreng-pengamat-elite-politik-harusnya-berempati>.

Rifa'an, Z. (2022). Kemendag Tuduh Warga Timbun Minyak Goreng, Yan Harahap: Kalau Menimbun Itu di Gudang Bukan di Rumah. <https://fajar.co.id/2022/03/08/kemendag-tuduh-warga-timbun-minyak-goreng-yan-harahap-kalau-menimbun-itu-di-gudang-bukan-di-rumah/>

Romadhoni, B.A. (2022). Pedes! Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto yang Sibuk Pasang Baliho Ketimbang Ngurusi Minyak Goreng. <https://jateng.suara.com/read/2022/02/06/071406/pedes-rizal-ramli-semprot-airlangga-hartarto-yang-sibuk-pasang-baliho-ketimbang-ngurusi-minyak-goreng>.

Sari, Y.M. (2022). Megawati Gelar Demo Masak Tanpa Minyak Goreng Bersama Chef. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6004911/megawati-gelar-demo-masak-tanpa-minyak-goreng-bersama-chef>.

- Saverin, W.J., & J.W. Tankard (2011). *Teori komunikasi: Sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Semi, M.A. (2012). *Metode penelitian sastra*. Bandung: Angkasa.
- Soetrisno & S.R. Hanafie (2007). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Social Research Glossary (2022). Content Analysis. <https://www.qualityresearchinternational.com/socialresearch/contentanalysis.htm>.
- Sugihartati, R. (2014). *Perkembangan masyarakat informasi & teori sosial kontemporer*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Sugiyono (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, I.T. (2020). Megawati Trending Topik di Twitter Gara-gara Soroti Ibu-ibu yang Rebutan Minyak Goreng. <https://radartegal.com/megawati-trending-topik-di-twitter-gara-gara-soroti-ibu-ibu-yang-rebutan-minyak-goreng.30285.html>.
- Tagar #MinyakGorengLangkaAjig (2022). <https://nitter.1d4.us/search?q=%23#MinyakGorengLangkaAjig>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>.
- Wandanovi (2022). Susi Pudjiastuti Sindir Pernyataan Lucu Mendag Lutfi Soal Minyak Goreng. <https://jabarekspres.com/berita/2022/03/23/susi-pudjiastuti-sindir-pernyataan-lucu-mendag-lutfi-soal-minyak-goreng/>
- West, R., & L.H. Turner (2014). *Pengantar teori komunikasi: Analisis dan aplikasi*. Jakarta: PT. Salemba Humanika.
- Wulandari, D.A. (2022). Tagar Tangkap Kartel Minyak Goreng Hari Ini Trending di Twitter. <https://www.jatimnetwork.com/nasional/pr-432981085/tagar-tangkap-kartel-minyak-goreng-hari-ini-trending-di-twitter?page=2>.